



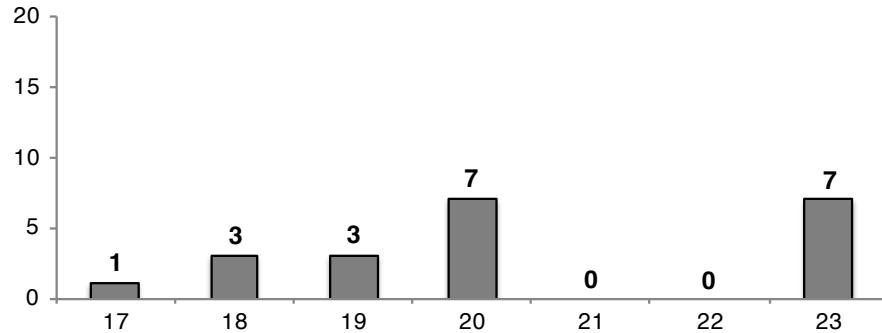
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(23 Juni 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
2	7	7	0	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 23 Juni 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	23 Juni 2025	Suara Merdeka	Kemenhub Tetap Berlakukan Aturan ODOL	1	Positive	
2	23 Juni 2025	Suara Merdeka	Gubernur Dorong Penggunaan CNG	9	Positive	
3	23 Juni 2025	Suara Merdeka	Perbaikan RTLH Ditarget Lima Tahun	9	Positive	
4	23 Juni 2025	Jateng Pos	Warga Brebes Korban TPPO Internasional Mengadu ke Ahmad Luthfi	2	Positive	
5	23 Juni 2025	Jateng Pos	Ngumpulno Balung Pisah	12	Positive	
6	23 Juni 2025	Jateng Pos	Agustina Dukung Pemenuhan Kebutuhan Rumah MBR dan ASN	2	Positive	
7	23 Juni 2025	Jateng Pos	Sinergitas Polda dan Pemprov Bongkar Tuntas Perdagangan Orang	2	Positive	

Title	Kemenhub Tetap Berlakukan Aturan ODOL		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ff, bn, ekd-34
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

Kemenhub Tetap Berlakukan Aturan ODOL

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan komitmennya untuk bertindak tegas dengan tetap memberlakukan aturan over dimension over loading (ODOL). Sanksi mulai dari tilang, penyttaan kendaraan, hingga pemblokiran STNK akan diterapkan bagi pelanggar.

Namun, pemerintah juga membuka ruang diskusi dengan asosiasi terkait seperti Apinda dan Aprindo. Tujuannya mencari solusi bersama, terutama terkait insentif modifikasi kendaraan dan penyesuaian tarif angkut.

"Harapannya, kebijakan ini tidak seka-

dar menertibkan kendaraan, tetapi juga tetap menjaga keberlangsungan usaha sopir dan pengusaha angkutan barang," demikian pernyataan resmi Kemenhub yang disiarkan, kemarin.

Sebelumnya, ribuan sopir truk di sejumlah kota di Jawa melancarkan aksi menolak aturan ODOL. Aturan baru mengenai angkutan barang yang melebihi ukuran dan muatan ini, terutama ancaman pidana bagi pelanggar, dinilai memberatkan dan memicu kekhawatiran di kalangan pengemudi dan pengusaha angkutan.

Aksi mogok para sopir truk ini menggambarkan dilema kompleks antara

kepatuhan terhadap regulasi dan kesejahteraan para pekerja di sektor transportasi.

Banyak pihak mengusulkan solusi realistik yang mengedepankan penegakan hukum sekaligus memberikan kompensasi. Usulan tersebut meliputi subsidi atau keringanan biaya modifikasi truk, revisi tarif angkut yang adil, pemberian tengat waktu adaptasi sebelum penindakan keras diberlakukan sepenuhnya.

Sangat Memberatkan

Sementara itu, Sekretaris Paguyuban Pengemudi Alas Roban Community (ARC) Batang, Beny Susilo, menegaskan bahwa pemberlakuan zero ODOL sangat memberatkan sopir truk. Kekhawatiran utama adalah ancaman pidana bagi pelanggar aturan ODOL yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian daerah (Polda) wilayah setempat berkaitan dengan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL). "ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan," kata Luthfi saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat, (20/6).

Menurutnya, sosialisasi kepada

masyarakat harus benar-benar dilakukan, agar dalam praktiknya berjalan dengan baik untuk wilayah Jawa Tengah. "Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Korps Lalu Lintas Polri merencanakan program nasional Indonesia Menuju Zero Over Dimension and Overloading sejak 1 Juni 2025. Kebijakan tersebut menggunakan tiga level pendekatan penindakan oleh petugas, yakni sosialisasi, peringatan, dan penegakan hukum.

Program tersebut bukan sekadar penyampaian imbauan, melainkan juga ada pendekatan langsung kepada para pengemudi, pemilik kendaraan, dan pengusaha jasa angkutan.

Namun dalam perkembangannya, kebijakan tersebut menuai protes dan memicu gelombang demo sopir truk di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah. Terpantau demo sopir truk tersebut sudah ada beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, dan Banyumas.

Para sopir truk tersebut menyampaikan penolakan aturan tersebut dan menuntut agar penerapannya tidak dilakukan secara tebang pilih. (ff.bn,ekd-34)



SM/jatengprov.go.id

Title	Gubernur Dorong Penggunaan CNG		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-23
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Gubernur Dorong Penggunaan CNG

SEMARANG - Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah, PT Jateng Petro Energi (JPEN), meluncurkan produk tabung compressed natural gas (CNG) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Dapur Mandiri Marwa, dapur MBG yang berada di Griya Sakinah Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jumat, (20/6).

"Saya sebagai gubernur menyampaikan terima kasih atas di-launching-nya penggunaan CNG ini, karena ini lebih murah," kata Luthfi seusai launching CNG dan meninjau Dapur Mandiri Marwa.

Luthfi mengatakan potensi gas alam di Jawa Tengah sangat besar, seperti di Kabupaten Grobogan, Blora, dan daerah lainnya. Potensi tersebut direspon dengan baik oleh PT JPEN dengan terobosan kreatifnya untuk dimanfaatkan sebagai pengganti gas elpiji.

Ia mendorong pemanfaatan CNG bisa lebih luas di masyarakat, seperti di rumah tangga, industri kecil, dan lainnya, termasuk dapur-dapur MBG di Jawa Tengah. Mengingat harganya yang lebih murah dibandingkan dengan gas elpiji.

Lakukan Sosialisasi

Oleh karenanya, Luthfi meminta agar JPEN terus melakukan sosialisasi terkait produk CNG tersebut. Sebab, selain murah, CNG juga merupakan salah satu energi terbarukan yang bersumber dari gas alam.

"Selama ini hanya masyarakat gas melon yang warnanya hijau. Kita nanti akan buat yang warnanya beda. Itu gas dari kita dan biayanya murah," kata Luthfi.

Biasanya, lanjut Luthfi, instalasi CNG untuk dapur MBG sekitar Rp 20 juta, namun jika menggunakan fasilitas JPEN, maka bisa

gratis.

Terkait dapur MBG, dari target 3.400-an dapur, saat ini di Jawa Tengah sudah ada sekitar 202 dapur. Jumlah tersebut akan diakseserasi di bawah Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Tengah dengan kolaborasi bersama berbagai pihak seperti TNI, Polri, swasta, dan mandiri.

Direktur PT JPEN, Dwi Budi Sulistiyan mengatakan, Dapur Mandiri Marwa merupakan dapur keempat yang disuplai CNG oleh JPEN. Tiga dapur lainnya ada di Kabupaten Wonogiri, yaitu Dapur Manyaran, Baturetno, dan Purwantoro dengan distribusi 4.800 m³ per bulan.

"Bulan Juli nanti akan menyuplai ke 18 dapur MBG ditambah furnitur. Di luar MBG sudah menyuplai juga ke hotel, restoran, kafe/catering (horeka) sebesar 7.000 m³ tersebut di seluruh Jawa Tengah," kata dia.

Pada Juli 2025 ini, akan ada penambahan pasokan sekitar 22.000 m³ lagi, jumlah itu sekitar 22 ton yang bisa menggantikan elpiji.

Dwi menjelaskan, ada perbedaan menjol antara CNG dengan gas elpiji. Untuk gas elpiji bahan dasarnya 85 % masih impor sedangkan CNG 100 % dari resevoir di Jawa Tengah. Jadi ini mendukung swasembada energi.

"Kami akan berupaya untuk berkontribusi riil kepada masyarakat, serta memberi dampak kepada alam semesta dengan energi bersih terbarukan," jelasnya.

Pengelola Dapur Mandiri Marwa, Gema Pancawati, mengatakan dapur MBG di Ungaran tersebut baru akan beroperasi pada awal tahun ajaran baru, yaitu sekitar Agustus 2025. Dapur itu akan melayani sekitar 3.517 orang di lima sekolah. Jumlah tersebut masih fluktuatif seiring dengan jumlah penerimaan murid baru di 5 sekolah tersebut.(ekd-23)



PELUNCURAN CNG: Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meluncurkan CNG di Dapur Mandiri Marwa, dapur MBG yang berada di Griya Sakinah Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jumat, (20/6). (23)

SM/dok

Title	Perbaikan RTLH Ditarget Lima Tahun		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd-44
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	9	PR Value	

Perbaikan RTLH Ditarget Lima Tahun

SEMARANG - Gubernur Jateng Ahmad Luthfi optimistis perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan rumah (*backlog*) di Jawa Tengah tuntas dalam lima tahun.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat acara penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (20/6) malam. Luthfi menyatakan, Jateng telah mempunyai program 1 KK 1 rumah layak huni. Harapannya, perbaikan RTLH di seluruh

Jawa Tengah bisa selesai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan per tahun ada sebanyak 17.000 ribu perbaikan RTLH, maka tidak ada lagi rumah miskin ekstrem atau RTLH di tempat kita. Begitu juga dengan *backlog*, makanya kami kumpulkan bupati/wali kota untuk memvalidkan data, jelas Luthfi.

Penanganan kebutuhan perumahan di Jateng pada 2025 sebanyak

26.356 unit. Rinciannya adalah 17.510 unit bersumber dari APBD Provinsi Jateng, 17.000 unit untuk RTLH dan 510 unit *backlog*. Adapun yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 6.776 unit, dan dari CSR sebanyak 2.070 unit. Menurut Luthfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jateng. Maka dari itu, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ketiga.

Kegiatan penandatanganan

dengan Kementerian PKP ini untuk menyatukan data dan mengakses erasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh bupati dan wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS, serta BP Tapera. "Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu, karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah," ujar Luthfi. (ekd-44)

Title	Warga Brebes Korban TPPO Internasional Mengadu ke Ahmad Luthfi		
Media	Jateng Pos	Reporter	ucl/rit
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	2	PR Value	

Warga Brebes Korban TPPO Internasional Mengadu ke Ahmad Luthfi

SEMARANG - Warga Kabupaten Brebes, Carmadi, mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di kantornya pada Jumat, 20 Juni 2025. Sebab, ia menjadi salah satu dari 83 orang korban sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional.

Awalnya, Carmadi tergiur dengan tawaran bekerja di Spanyol sebagai kru kapal ikan dengan iming-iming gaji €3.000 per bulan. Tapi semua berubah menjadi mimpi buruk, lantaran ia justru diberi pekerjaan sebagai pelayan restoran dengan upah jauh di bawah janji. Ia dan korban lainnya justru diberangkatkan secara ilegal ke negara-negara Eropa seperti

Spanyol, Portugal, Polandia, dan Yunani.

Dalam pertemuan bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Subagio, Carmadi mewakili korban lainnya menceritakan kronologi panjang bagaimana ia bisa lolos dan kembali ke Indonesia.

"Terima kasih saya sampai-kann kepada Pak Gubernur dan Polda Jateng. Saya bisa pulang, tapi teman-teman saya masih banyak di sana. Nasib mereka saya tidak tahu," ujar Carmadi.

Menurut data dari Polda Jateng, sindikat ini dijalankan oleh tersangka KU (Kunali) asal Tegal dan NU (Nurjaman) dari Brebes. Mereka merekrut kor-

ban dari berbagai daerah, lalu menjanjikan pekerjaan legal di Spanyol dengan bayaran tinggi.

Korban seperti Carmadi diminta membayar biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan sebesar Rp65 juta, namun total kerugiannya beragam dan mencapai lebih dari Rp75 juta.

Setelah sampai di Spanyol, para korban justru ditempatkan di rumah agen dan direkam dalam video menjadi semacam "komoditas" untuk dijual ke tempat kerja yang belum pasti.

"Awalnya dijanjikan kerja di kapal, tapi begitu sampai malah disuruh kerja di restoran Cina. Gajinya 900 euro. Teman saya ada yang cuma dapat

700 euro. Tidak sesuai sama sekali," kata Carmadi.

Data Polda Jateng menyebutkan, total korban yang diberangkatkan oleh sindikat ini mencapai 83 orang, dengan kerugian korban dalam satu laporan mencapai Rp5,8 miliar.

Sebagian korban berhasil kembali ke Indonesia, termasuk 5 orang dengan biaya sendiri, seperti Carmadi, yang kini menjadi pelapor kasus ini.

Barang bukti yang diamankan Polda Jateng meliputi: paspor, bukti transfer, print-out pemesanan tiket, dokumen perjanjian kerja, serta percakapan digital. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,

serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyatakan dengan tegas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendampingi proses hukum dan pemulihan korban TPPO. Apalagi dari kasus yang terungkap, sebagian besar warga Jateng

"Kita sudah koordinasi dengan Polda dengan lawyernya (korban), sedapat mungkin masyarakat kita nanti akan kita tarik atau kita kembalikan ke Jawa tengah," tegasnya usai berdialog secara daring melalui Zoom bersama korban maupun keluarga. (**ucl/rit**)

Title	Ngumpulno Balung Pisah		
Media	Jateng Pos	Reporter	Jan
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



BALUNG PISAH: Gubernur Jateng Ahmad Lutfi menerima kunjungan gubernur Malaka Tuan Yang Terutama (TUN) Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam.

HUMASJATENPOS

Ngumpulno Balung Pisah

Gubernur Malaka Temui Gubernur Ahmad Lutfi

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima kunjungan kehormatan dari Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tuan Yang Terutama (TYT) Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, di kantornya, Jumat, 20 Juni 2025.

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam pengembangan hubungan budaya dan kerja sama lintas sektor antara dua wilayah se-rumputan. Istilah Ahmad Lutfi, ini ngumpulno balung pisah.

Dalam sambutannya, TYT Tun Mohd Ali, yang juga menjabat sebagai Presiden Dunia Melayu

Dunia Islam (DMDI), menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemprov Jateng. Ia mengaku kunjungannya kali ini bukan yang pertama.

"Ini kali ketiga atau keempat saya ke Semarang. Hubungan Melaka dan Indonesia sangat

erat, kita semua bersaudara dalam bumi Melayu," ujar Tun Mohd Ali.

Ia menekankan pentingnya kerjasama di berbagai bidang, seperti pendidikan, teknologi, industri, bisnis, kesehatan. Ia juga memperoriente tontangan global yang dihadapi masyarakat Islam dan perlunya kolaborasi untuk memperkuat generasi muda dalam menghadapi berbagai persoalan dunia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut hangat kehadiran rombongan dari Negeri Melaka. Ia menegaskan Jawa Tengah dan Malaysia memiliki ikatan kultural yang kuat sebagai bagian dari rumputan Melayu.

"Indonesia satu rumput dengan Melaka. Jadi tidak salah kalau



Indonesia satu rumput dengan Melaka. Jadi tidak salah kalau pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi—bahasa Jawa: ngumpulno balung sing pisah

AHMAD LUTFI
(Gubernur Jateng)

pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi—bahasa Jawanya: ngumpulno balung sing pisah,” kata Lutfi.

Ia juga menyinyalung potensi kerja sama dalam bidang pariwisata halal, kesehatan, dan investasi. Lutfi bahkan menyatakan miniaturnya untuk melakukan studi komparatif ke Penang, Malaysia, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang menurutnya menjadi daya tarik utama warga Indonesia berobat ke sana.

"Saya akan ke sana untuk studi komparatif. Kita perlu belajar soal pelayanan kesehatan yang paripurna. Di sana, orang bisa sembuh sebelum diobati," ujarnya berseri-seri.

Gubernur Lutfi turut menyampaikan Malaysia berada di peringkat keenam sebagai negara investor di Jawa Tengah. Ia berharap posisi itu dapat dit

ingkatkan melihat kedekatan budaya yang dimiliki kedua wilayah.

"Kalau satu rumput, harusnya Malaysia nomor satu. Kalah dengan Singapura, Cina, Korea. Kalau tidak investasi di Jawa Tengah maka rugi," katanya sambil tersenyum.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menjajaki peluang pengembangan wisata ramah muslim dan pertukaran ekonomi antarwilayah serta wacana kota maupun provinsi kembar. Gubernur Ahmad Lutfi berkomitmen akan membela kunjungan ini dengan mengirim delegasi resmi ke Melaka pada September 2025 mendatang. (*/jan)

Title	Agustina Dukung Pemenuhan Kebutuhan Rumah MBR dan ASN		
Media	Jateng Pos	Reporter	sgt/rit
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	2	PR Value	

Agustina Dukung Pemenuhan Kebutuhan Rumah MBR dan ASN

SEMARANG - Agustina, Wali Kota Semarang, menghadiri prosesi penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan pada Jumat (20/6) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Nota kesepakatan tersebut dilakukan untuk menyatakan data dan mengakses erasi pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Penandatanganan juga dilakukan oleh bupati-wali kota se-Jateng, Bank Jateng, BPS dan BP Tapera.

"Kesepakatan itu di antaranya adalah bagaimana nanti bisa membuat formulasi terkait data-data perumahan

dan kebutuhan masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Kesepakatan ini perlu karena nanti dari pemerintah pusat akan membuat suatu koordinasi terkait dengan bantuan-bantuan rumah yang secara simultan akan diratakan di seluruh kabupaten kota di wilayah kita," kata Gubernur Ahmad Lutfi usai acara.

Menurut Lutfi, penyelenggaraan dan pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu indikator untuk memangkas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Maka dari itu diperlukan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta CSR dan bantuan sosial dari pihak ke tiga.

Sementara menurut Agustina, nota kesepakatan tersebut dijalankan guna mensinergikan dan mengoptimalkan penyaluran program



FOTO : SGIT/JATENG POS

MENGHADIRI: Agustina, Wali Kota Semarang, menghadiri prosesi penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait bidang perumahan pada Jumat (20/6) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

pemenuhan hunian pertama berbasis data melalui peranan bagi masyarakat Jawa Tengah. Tentunya Pemerintah Kota Semarang sangat menyambut baik dan akan menggunakan data dari BPS sebagai

acuan agar tepat sasaran khususnya dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," tutur

Agustina.

Dirinya mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai strategi selain pemutakhiran data BPS, juga memberikan kemudahan dalam pemberian fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pencegahan deadlock, termasuk berkolaborasi dengan sejumlah pihak seperti para asosiasi pengembang perumahan.

"Semangat ini demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Harapannya tidak ada yang dirugikan baik itu masyarakat, pemerintah, dan pengusaha serta roda perekonomian melalui pembangunan perumahan terus bergulir," ujarnya.

Disinggung terkait rencana kementerian yang akan meningkatkan pemenuhan target

penyaluran dari sebelumnya 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, Agustina menegaskan menunggu keputusan alokasi yang diberikan untuk Kota Semarang. "Berapa pun kami siap," katanya.

Agustina menekankan peran penting data dalam menunjang peningkatan kuota perumahan nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, dengan data dari BPS, Pemerintah Kota Semarang dapat mengidentifikasi keluarga-keluarga yang benar-benar layak dan harus mendapatkan bantuan perumahan atau kepemilikan rumah murah.

"Data BPS Kota Semarang nanti akan menjadi titik awal penetapan sasaran program, menjadi data valid. Dan itu yang akan kami jalankan pertama kali sebelum menentukan skema perumahan terbaik untuk masyarakat," pungkasnya. (sgt/rit)

Title	Sinergitas Polda dan Pemprov Bongkar Tuntas Perdagangan Orang		
Media	Jateng Pos	Reporter	ucl/rit
Date	2025-06-23	Tone	Positive
Page	2	PR Value	

Sinergitas Polda dan Pemprov Bongkar Tuntas Perdagangan Orang

SEMARANG - Komitmen tegas untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) disampaikan oleh Polda Jawa Tengah dalam pertemuan bersama Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi beserta keluarga korban TPPO di Kantor Gubernur Jateng, belum lama ini.

Dalam agenda yang turut dihadiri Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dan Kabid Humas Kombes Pol Artanto ini, Polda Jateng menyatakan keseriusannya untuk mengusut tuntas jaringan TPPO yang telah menjerat puluhan warga Jawa Tengah sebagai korban.

Kegiatan yang juga diisi dengan dialog antara Gubernur dan keluarga korban serta komunikasi daring dengan para korban yang masih berada di

luar negeri, menjadi momen penting untuk menyampaikan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

"Kemarin kami telah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban 90 persen dari Jateng. Kami akan terus melakukan pengembangan serta penelusuran aset tersangka. Kami tidak akan berhenti sampai jaringan ini benar-benar dihentikan," tegas Kombes Pol Dwi Subagio.

Polda Jateng juga mendorong peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan pengiriman tenaga kerja ilegal.

"Kami mohon bantuan masyarakat, jika melihat indikasi perdagangan orang, segera lapor ke Kepolisian terdekat. Setiap laporan akan

ditindaklanjuti secara cepat dan serius," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng menekankan pentingnya perlindungan dan pemulangan korban, serta menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja. "Secepatnya masyarakat kita yang menjadi korban akan kita tarik kembali pulang ke Jateng, karena dokumen yang mereka miliki tidak sesuai peruntukannya dan akan menjadi masalah hukum di negara tempat mereka bekerja," tegas Gubernur Jateng.

"Kita tidak hanya memulangkan mereka, tetapi akan menyiapkan lapangan kerja agar mereka tidak menanggung beban akibat penipuan yang mereka alami, Dinas



FOTO : DWI SAMBODO/JATENGPOS

KETERANGAN : Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio tengah memberikan keterangan terkait sinergitas bongkar jaringan TPPO bersama Provinsi Jateng.

Tenaga Kerja kami perintahkan untuk menyalurkan hukum untuk tidak hanya menangani dampak TPPO, tetapi juga mencegah dan memutus mata rantai kejahatan ini secara sistematis dan berkelanjutan. (ucl/rit)

daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menangani dampak TPPO, tetapi juga mencegah dan memutus mata rantai kejahatan ini secara sistematis dan berkelanjutan. (ucl/rit)